

URGENSI PEMBINAAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI COMMUNITY CIVICS

Rohani

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP-PGRI Pontianak
 Jalan. Ampera No.88 Pontianak Telp. (0561) 748219, E-Mail. info@ikipgriptk.ac.id
 E-Mail: muslimah.ani@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pembinaan tanggung jawab warga negara. Pembinaan tanggung jawab warga tidak hanya dilakukan oleh pendidikan formal, namun perlu dilakukan oleh pendidikan informal dan pendidikan non formal. Mengingat sekarang bangsa Indonesia memasuki era globalisasi maka perlu diadakan pembinaan tanggung jawab warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam domain akademik, domain kurikuler, maupun domain sosial kultural. Ketiga domain ini harus berjalan secara seimbang, berkesinambungan dan berlangsung terus menerus. Dalam artikel ini dibahas tentang pembinaan tanggung jawab warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan domain sosial kultural yang dilaksanakan oleh *community civics*.

Kata Kunci: pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan, *community civics*

Abstract

This paper explores the guidance of civic responsibilities. It should be conducted not only in formal education but also in informal education and non-formal education. Dealing with globalization era, the guidance of civic responsibilities should be realized through citizenship education within academic, curricular, or socio-cultural domain. These domains should be maintained equally and continuously. This paper discusses the guidance of civic responsibilities through socio-cultural domain of civics conducted by community civics.

Keywords: education, citizenship education, *community civics*

PENDAHULUAN

Saat ini, warga negara dihadapkan pada perkembangan zaman yang sangat pesat yaitu era globalisasi, hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Era globalisasi saat ini membawa dampak yang sangat besar terhadap bangsa ini, baik itu dampak positif misalnya kemajuan teknologi komunikasi dan transformasi, juga dampak negatif yang sulit kita hindari dan sangat berpengaruh besar terhadap sistem budaya masyarakat Indonesia. Dampak negatif globalisasi merambah dengan cepat kesemua lapisan masyarakat dan semua kalangan usia. Salah satu dampak negatifnya timbullah masalah degradasi nilai moral yang terjadi dikalangan anak muda terutama siswa, seperti tawuran, perilaku kekerasan, penggunaan bahasa kasar setiap hari,

kematangan seksual terlalu dini dan penyimpangannya, pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang menjadi perilaku sehari-hari, dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan nilai moral yang terjadi. Oleh karena itu setiap warga negara harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka.

Pembinaan tanggung jawab warga negara dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diungkapkan oleh Wahab dan Sapriya (2011) yang menyatakan bahwa tujuan diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang selain memiliki kecerdasan (*civic intellegence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic partisipation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Upaya untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebenarnya sudah lama dan banyak dilakukan, terutama di dunia persekolahan dengan ujung tombaknya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*). Winataputra dan Budimansyah (2012) memandang ada tiga domain PKn yaitu domain kurikuler, domain sosiokultural, dan domain kajian ilmiah ketiga domain itu saling keterkaitan satu sama lainnya.

Realitanya pembangunan karakter tanggung jawab yang dilakukan selama ini melalui pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan belum berhasil mencapai harapan hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang berlaku, tawuran, dan korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapriya (2007: 5) yang menyatakan bahwa “upaya pembangunan karakter bangsa melalui PKn sebagai mata pelajaran di sekolah yang telah lama berlangsung sejak lama itu belumlah optimal dan belum berhasil mencapai harapan, bahkan hingga saat ini program pendidikan ini malah dipertanyakan keberadaan dan perannya”. Pada kenyataannya banyak hal yang sudah

dilakukan di sekolah, baik dari segi memperbaiki metode mengajar guru, media, maupun sumber belajar, namun belum berhasil secara maksimal. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan belum dilakukan secara sinerginitas antara Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal, Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan nonformal dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan informal.

Berdasarkan uraian di atas bahwa setiap orang dituntut bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu pembinaan tanggung jawab sangat penting dilakukan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk membentuk kepribadian warga negara. Melalui pendidikan diharapkan terjadi proses pendewasaan, baik dewasa dalam pola pikir maupun dewasa dalam perilaku. Selain itu, pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses bimbingan dan pembelajaran bagi individu, agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa melalui pendidikan kepribadian atau karakter warga negara dapat terbentuk, terutama melalui dunia persekolahan dengan ujung tombaknya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis sebagai pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*). Ada dua istilah yang digunakan dalam pengertian PKn menurut kepustakaan asing yaitu PKn (dalam arti *civic education*) dan PKn (dalam arti *citizenship education*). Kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda namun tujuannya sama yaitu untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik. Gagasan ini sesuai dengan pendapat Cogan (1999: 4) yang menyatakan bahwa:

Civic education, ...the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult life.

“Citizenship Education or Education for Citizenship”,... both these in school experiences as well as out of school or non formal an formal learning which takes place in the family, the religious organization. Community organizations, the media. Etc which help to shape the totally of the citizens.

Hal ini dapat dimaknai bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, setelah mereka dewasa. *Civic education* merupakan mata pelajaran di sekolah, kalau di Indonesia mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan istilah yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam media dan lain sebagainya yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warga negara.

Citizenship education atau *education for citizenship* merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan *civic education*, namun *civic education* merupakan bagian penting di dalamnya. Dengan kata lain *civic education* sebagai PKn dalam pendidikan formal yang menerima dampak pengiring dari berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. *Citizenship education* atau *education for citizenship* berlangsung dalam pendidikan nonformal atau informal yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat, kalau di masyarakat dilakukan oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya. Dari beberapa gagasan diatas maka melalui PKn, diharapkan terbentuklah warga negara yang baik, yang memiliki karakter serta menjadi manusia yang beriman dan berilmu atau dengan kata lain menjadi manusia seutuhnya yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Saat ini, tradisi itu (Pendidikan Kewarganegaraan) sudah berkembang pesat menjadi struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik dengan tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Domain akademis adalah berbagai

pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Sapriya: 2012: 31).

Mencermati pendapat di atas dapat dimaknai kurang berhasilnya Pendidikan Kewarganegaraan selama ini dalam membangun karakter bangsa, karena masih memfokuskan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal saja. Oleh sebab itu perlu dilakukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraanyaitu dengan diajarkannya Pendidikan Kewarganegaraan secara berkesinambungan antara pendidikan formal, nonformal dan informal. Hal ini sejalan dengan pendapat Budimansyah (2010: 145-146) yang menyatakan bahwa untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosiso-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Untuk itulah selain upaya yang terus menerus pengembangan karakter di lingkungan persekolahan dengan pengembangan konsep dan metodologi juga tidak kalah pentingnya pengembangan karakter bangsa di lingkungan masyarakat (*community civics*) sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Warga Negara

Setiap negara pasti mempunyai warga negara. Secara istilah “warga negara” dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata “*citizen*” dalam bahasa Inggris atau “*citoyen*” dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Belanda warga negara diterjemahkan dari kata *staatsburger*. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan: “warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Sejalan dengan pendapat diatas Cogan (1998:13) menyatakan bahwa: “ *a citizen as a constituent member of society*” (anggota sah dari suatu masyarakat). Pendapat lain yang

membahas tentang warga negara yaitu Turner (Wuryan dan Syaifullah , 2008:108) yang menyatakan:

Warga negara adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal diwilayah hukum tertentu. Adapun hukum itu dibuat,disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat,mereka inilah yang selanjutnya disebut pemerintah. Jadi warga negara adalah anggota dari suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pasal 2 menyatakan bahwa “warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia adalah anggota dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Warga negara yang Bertanggung Jawab

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengembangkan *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation*. Pada bagian ini dibahas tentang warga negara yang bertanggung jawab. Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) atau kebajikan (*virtue*) selaku warga negara. Berkaitan dengan keutamaan atau kebajikan itu, Plato mengemukakan ada empat keutamaan atau kebajikan yang dihubungkan dengan tiga bagian jiwa manusia. Keempat kebajikan itu ialah pengendalian diri (*temperance*) yang dihubungkan dengan nafsu, keberkasaan (*fortitude*) yang dihubungkan dengan semangat (*thumos*), kebijaksanaan atau kearifan yang dihubungkan dengan akal (*nous*), dan keadilan yang dihubungkan dengan ketiga bagian jiwa manusia itu (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 45).

Dari pendapat Aristoteles dan Plato dapat dianalisis, bahwa Aristoteles memandang keutamaan atau kebajikan manusia sesuai dengan fungsi dan peranannya

harus dilihat secara utuh. Keutamaan atau kebajikan ini selaku warga negara. Sedangkan Plato menghubungkan keutamaan atau kebajikan itu dengan bagian-bagian jiwa manusia.

Dalam makalah ini warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) yaitu warga negara yang berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku.

Jenis-jenis Tanggung Jawab Warga Negara

Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengenal jenis-jenis tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, dipandang penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara tersebut, yang meliputi: (1) tanggung jawab pribadi: seperti tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri; (1) tanggung jawab sosial (*social responsibility*) seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 46).

Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan beribadah sesuai dengan keyakinan, mengerjakan amalan-amalan sunah, dan dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang dipancari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhannya.

Tanggung jawab warga negara terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri hal yang paling mendasar yang menentukan kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Apabila seseorang sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap dirinya maka akan muncul disiplin dalam dirinya.

Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat

Tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat yang bisa dilakukan dengan menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menghapus tindakan diskriminatif dalam dilingkungannya.

Tanggung jawab warganegara terhadap lingkungan

Tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan, dan menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya membuang sampah pada tempatnya, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Tanggung jawab warganegara terhadap bangsa dan negara

Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu tanggung jawab warga negara dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

Tanggung jawab sebagai karakter

Pada saat ini begitu banyak masalah degradasi nilai moral yang terjadi dikalangan generasi muda, seperti tawuran, perilaku kekerasan, penggunaan bahasa kasar setiap hari, kematangan seksual terlalu dini dan penyimpangannya, pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang menjadi perilaku sehari-hari, dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan nilai moral yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa melalui pendidikan, karakter seseorang dapat dibentuk. Karakter secara sederhana dapat diartikan sebagai watak, perangai yang terdapat dalam seorang pribadi. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010: 3) yang menegaskan bahwa: Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang,berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara itu, Sumantri (2011: 3) menegaskan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*virtues*). Sejalan dengan itu, Sukadi (2011: 83) menyatakan bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya. Dari tiga definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah watak, tabiat yang terdapat dalam kepribadian seseorang yang terbentuk dari internalisasi berbagai kebajikan yang mendasari seseorang bertindak terhadap lingkungannya.

Hampir semua sepakat bahwa terjadinya degradasi moral yang melanda bangsa ini diakibatkan melemahnya nilai-nilai moral bangsa dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan hal ini salah satu penyebabnya adalah kurang berhasilnya pendidikan yang membina karakter di sekolah. Pendidikan yang terjadi selama ini lebih mengembangkan aspek kognitif ketimbang aspek afektif atau moral dan watak.

Pendidikan karakter menurut Lickona (1992: 53) adalah pendidikan yang menitik beratkan dalam hal pembentukan kepribadian melalui pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan perilaku bermoral (*moral behavior*) hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras. Selanjutnya, Lickona (1992: 56) menyimpulkan pendidikan karakter sebagai upaya sengaja yang menolong agar memahami, peduli, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis. Sementara itu, Megawangi (2004: 95) menegaskan pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya.

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan kepribadian atau watak sehingga setiap individu dapat mengambil keputusan dengan bijak yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendapat yang membahas karakter yaitu menurut Branson dalam tulisannya yang berjudul *From Character Development and Democratic Citizenship* (2007: 3) yang disebut dengan *Character Counts* di Amerika. Ia mengidentifikasi ada enam karakter yang perlu dimiliki oleh setiap orang, adapun keenam karakter yang menjadi pilar yaitu:

- a) *trustworthiness* (rasa percaya) bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal;
- b) *respect* (rasa hormat); bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain;
- c) *responsibility* (tanggung jawab); bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin;
- d) *fairness* (kejujuran) yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki

- pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain;
- e) *caring* (kepedulian) yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar;
 - f) *citizenship* (kewarganegaraan) yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.

Sementara itu, Kemendiknas (2010: 9-10) mengemukakan bahwa nilai dan pendidikan budaya dan karakter bangsa terdiri dari:

- (a) Religius; (b). Jujur; (c). Toleransi; (d). Disiplin; (e). Kerja keras; (f). Kreatif; (g). Mandiri; (h). Demokratis; (i). Rasa ingin tahu; (j). Semangat kebangsaan; (k). Cinta tanah air; (l). Menghargai prestasi; (m). Bersahabat/komunikatif; (n). Cinta damai; (o). Gemar membaca; (p). Peduli lingkungan; (q). Peduli sosial; (r). Tanggung jawab.

Sementara menurut Indonesia *Heritage Foundation* (Majid dan Andayani, 2011: 42) merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Adapun kesembilan karakter itu yaitu:

- (a) Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (b). Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; (c). Jujur; (d). Hormat dan santun; (e). Kasih sayang, peduli, dan kerja sama; (f). Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (g). Keadilan dan kepemimpinan; (h). Baik dan rendah hati; (i). Toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Dari uraian di atas, dapat dimaknai bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari salah satu pendidikan nilai dan karakter yang perlu dikembangkan agar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu diharapkan pendidikan formal, informal, dan nonformal harus benar-benar dalam mendidik anak didiknya sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Community Civics (Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan)

Gerakan *Community Civics* dipelopori oleh Dunn (1907) yang mengarah: “...a branch of study of the civics that emphasizes the individual’s relation to his social environment which is conceived as a series of successively enlarged communities, local, state and national”. (Good, 1959: 99, dalam Wahab dan Sapriya, 2011: 4). Kalau di Indonesia, gerakan ini termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan domain sosial kultural.

Saat ini tradisi Pendidikan Kewarganegaraan sudah berkembang pesat menjadi suatu *integrated knowledge system* yakni suatu *body of knowledge* yang

memiliki paradigma sistemik, yang didalamnya terdapat tiga domain *citizenship education* yakni: domain akademik, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Bidang kajian ini secara sistemik memiliki tiga dimensi yakni: (a) program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara akademis dikenal sebagai *school civic education* (SCE); (b) program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai *community civic education* (CCE); (c) kajian ilmiah kewarganegaraan yang didalamnya tercakup *civic research and development* (CRD) (Winataputra, 2012: 249-250).

Pendapat lain menyatakan bahwa dalam spektrum yang lebih luas PKn sebagai *Citizenship Education* memiliki tiga domain, yakni domain kurikuler (PKn sebagai mata pelajaran di sekolah), domain sosiokultural (PKn yang berkembang di masyarakat oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya), dan domain kajian ilmiah (kegiatan penelitian dan pengembangan program-program pendidikan kewarganegaraan) (Winataputra dan Budimansyah, 2012: 211). Hal ini juga sejalan dengan Budimansyah (2010: 145-146) yang menyatakan bahwa untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Selanjutnya Sumantri (2010) menyatakan bahwa "*community civics* merupakan salah satu bahan Pendidikan Kewarganegaraan melalui metoda ceramah yang sering disampaikan kepada masyarakat termasuk masyarakat awam melalui "institusi" agama seperti metoda dakwah, tauladan, dan metode latihan melalui program *civic mission*". Adapun materi pendidikan kewarganegaraan masyarakat (*community civics*) terdiri dari *civic education*, pendidikan demokrasi, *civic literacy* yang merupakan pendidikan moral dan pendidikan tingkah laku sosial.

Dari gagasan tersebut dapat dimaknai bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan membina warga negara Indonesia agar menjadi warga negara yang memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara . Pembangunan karakter melalui gerakan sosial kultural Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting, dimana pelaksanaannya di sesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui *Community Civics*

Setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak lepas dari tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Sapriya (2010: 17) bahwa sedikitnya ada dua pengertian tanggung jawab:

- a. Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.
- b. Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berperilaku menurut cara tertentu.

Selanjutnya menurut Ridwan Halim (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 43) menyatakan “tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau pun kekuasaan”. Senada dengan pendapat tersebut menurut Purbacaraka (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 43) berpendapat bahwa “tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya’. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bersumber dari hak dan kewajiban. Dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu maka timbullah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pembinaan tanggung jawab melalui *community civics* dapat dilakukan melalui metoda ceramah metode dakwah, tauladan, dan metode latihan melalui program *civic mission* yang sering disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat dilakukan melalui LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya

SIMPULAN

Untuk membentuk atau membina karakter dapat dilakukan melalui pendidikan dengan ujung tombaknya Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam makalah

ini dibahas secara singkat mengapa pembentukan dan pembinaan karakter yang selama ini dilakukan belum berhasil secara optimal. Hal ini menurut hemat penulis disebabkan oleh kurangnya implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembinaan karakter tanggung jawab melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain sosial kultural (*community civics*) sangat penting untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010. *Bahan Penelitian Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Branson, M.S. 2007. *Character Development and Democratic Citizenship*. Argentina: World Congress on Civic Education Buenos Aires.
- Budimansyah. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cogan, J.J. & Dericott, R. 1998. *Citizenship education For The 21st Century: Setting the Contexts*. London: Kogan page.
- Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civil Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Kemdiknas. 2010. *Naskah Akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: tidak diterbitkan.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Simon & Schuster, Inc.
- Majid, A. & Andayani, D. 2011, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Megawangi, R. 2004. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Nurmalina & Syaifullah. 2008. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab PKn.
- Sapriya. 2010. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.

Sumantri, E. 2010. Makalah: *Pendidikan Kewarganegaraan Masyarakat (Community Civics)*. Tidak diterbitkan.

..... 2011. *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan dan Kepribadian Bangsa: "Pendidikan Budaya dan Karakter Suatu Keniscayaan Bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa" Penghargaan dan Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed.* Bandung: Widya Aksara Press.

Sukadi. 2011. *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan dan Kepribadian Bangsa "Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila" Penghargaan dan Penghormatan 70 Tahun Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed.* Bandung: Widya Aksara Press.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Wahab & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Winataputra. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Winataputra, & Budimansyah. 2012. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.